BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum kategori kecil sekurang-kurangnya terdiri atas Satuan Pengawas Intern, bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan, bidang yang menangani urusan teknik/operasional, dan bidang yang menangani hubungan pelanggan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat fungsi pengawasan internal, serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan operasional perusahaan, diperlukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Jaya yang lebih adaptif dan proporsional guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 134 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 58 Seri E Nomor 7);

17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 134 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, Pasal 2 ayat (1) huruf i dan huruf h diubah, di antara huruf h dan huruf i Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, ayat (2) huruf c dihapus, dan ayat (3) huruf c dihapus, serta diantara ayat (3) dan (4) disisipkan 1 ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Susunan Organisai Perumda Air Minum Tirta Mon Mata terdiri atas:
   a. KPM;
   b. Dewan Pengawas;
   c. Direksi;
   d. Satuan Pengawas Internal;
   e. Bagian Umum dan Keuangan;
   f. Bagian Teknik dan Operasional;
   f1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan;
   g. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Jaya;
   h. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Darul Hikmah;
   h1. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Krueng Sabee;
   i. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Panga; dan
   j. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Teunom.

(2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. dihapus.

(3) Bagian Teknik dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Subbagian Produksi dan Distribusi; dan
   b. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan.
   c. dihapus.

(3a) Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Subbagian Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran; dan
b. Subbagian Pemeliharaan Meter Air dan NRW.

(4) Susunan Organisasi Perumda Air Minum Tirta Mon Mata sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
b. pembinaan, penyusunan dan penetapan peraturan kepegawaian;
c. pengurusan dan pengelolaan kekayaan;
d. pembinaan pengelolaan administrasi umum, administrasi teknik dan keuangan;
e. penyusunan rencana jangka panjang (rencana strategis/*business plan*/*corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian;
g. pengangkatan untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; dan
h. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

(2) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dengan persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
d. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
e. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
f. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.

(3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan setingkat Kepala Bidang.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas:
a. pengendalian uang pendapatan hasil penagihan rekening air dan non air;
b. pemeriksaan kebenaran proses penerimaan dan pengeluaran keuangan dan barang persediaan;
c. pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran bendahara, bukti penerimaan yang diterima dari bendahara dan penyetor;

d. penyetoran semua penerimaan ke kas Perumda sesuai bukti penarikan;
e. pengadaan *stock opname* kas/Bank, rekening yang ada di pusat maupun di setiap IKK;
f. membuat laporan bulanan secara berkala;
g. melaksanakan tugas surat-menyurat dan arsip; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. pengelolaan kegiatan di bidang keuangan kerumahtanggaan, peralatan kantor dan pergudangan;
b. menyelenggarakan absensi notulensi rapat;
c. pelaksanaan perhitungan kebutuhan persediaan minimal dan mengajukan usulan permintaan barang sesuai kebutuhan;
d. pengawasan dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas barang dan jasa;
e. pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan unit kerja; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

(3) dihapus.

4. Di antara huruf j dan huruf k Pasal 17 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1 dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Subbagian Produksi dan Distribusi mempunyai tugas:
a. mengendalikan seluruh pengelolaan air baku;
b. mengurus sarana dan prasarana transmisi maupun produksi dan distribusi;
c. mengendalikan dan mengawasi mesin-mesin pompa secara mekanikal dan elektrikal;
d. memimpin dan mengoordinir operasional produksi, distribusi serta perawatan perbaikan dan pemeliharaan;
e. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi;
f. mengatur, menyelenggarakan fungsi mekanik mesin, ketenangan, kualitas serta laboratorium;
g. merencanakan, mengatur dan mengawasi pemakaian bahan kimia sesuai standar yang dibenarkan;
h. pengecekan kualitas air secara berkala;
i. memeriksa jalur transmisi, distribusi dan sambungan dinas secara periodik;
j. mengontrol jalannya distribusi air, tekanannya cukup dan merata keseluruh wilayah;
j1. melaksanakan program teknis terhadap kehilangan air; dan
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik dan Operasional dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

a. merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
b. mengoordinir dan membuat RAB, sambungan perbaikan dan pemeliharaan;
c. merencanakan dan mengawasi semua kegiatan konstruksi dan pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan;
d. menetapkan spesifikasi teknis sesuai rencana pelaksanaan kegiatan;
e. memproyeksikan risiko operasional dan tindak lanjut;
f. menjamin terlaksananya kegiatan operasional sesuai perencanaan yang telah ditetapkan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik dan Operasional, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

(3) Dihapus

5. Di antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan
Pasal 17A

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direksi dalam pelayanan pelanggan dan melaksanakan tugas informasi, komunikasi, publikasi, promosi dan mediasi.

Pasal 17B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja, program dan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan hubungan pelanggan;
b. pengelolaan komunikasi internal dan eksternal perusahaan untuk mendukung penyampaian informasi yang efektif dan akurat;
c. pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan pengelolaan media komunikasi perusahaan, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun media informasi lainnya;
d. melakukan identifikasi dan penertiban terhadap sambungan langganan;
e. pengelolaan pelayanan informasi, penerimaan, pencatatan, penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan, saran, serta masukan pelanggan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan;
g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, promosi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan air minum serta penggunaan air secara efisien dan bertanggung jawab;

h. pelaksanaan survei kepuasan pelanggan, analisis hasil survei, serta penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan;
i. pembinaan hubungan yang harmonis dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah daerah, media massa dan pemangku kepentingan lainnya;
j. pengelolaan administrasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan hubungan masyarakat dan hubungan pelanggan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di bidang hubungan masyarakat dan hubungan pelanggan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan.

Pasal 17C

(1) Subbagian Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menerima pengaduan pelanggan;
b. menyampaikan informasi kepada pelanggan dan masyarakat mengenai pelayanan, gangguan distribusi air, pemeliharaan jaringan, serta kegiatan perumda;
c. melaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, promosi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelayanan air minum serta penggunaan air secara efisien dan bertanggung jawab;
d. membuat data sambungan calon pelanggan baru;
e. membuat klasifikasi pelanggan;
f. membuat perintah kerja, penyegelan dan pembukaan kembali, pencabutan, pemasangan sambungan baru dan perbaikan yang berhubungan dengan pelanggan;
g. mengirim surat pemberitahuan/peringatan kepada pelanggan yang menunggak;
h. melakukan penertiban kepada pelanggan yang menunggak;
i. melaksanakan survei kepuasan pelanggan, analisis hasil survei, serta penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan;
j. melakukan koordinasi dengan pihak *Payment Point Online Bank;*
k. membuat laporan bulanan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

(2) Subbagian Pemeliharaan Meter Air dan NRW mempunyai tugas:
a. mengendalikan, menyelenggarakan kegiatan bidang penyedia meter air, jenis, kualitas dan lain-lain;
b. melaksanakan pemeriksaan meter air pelanggan;
c. melakukan kalibrasi dan verifikasi terhadap water meter yang rusak;
d. melakukan pemeliharaan dan pergantian meter air secara rutin dan berkala;
e. melakukan program penyambungan, penyaluran meter air dan administrasi meter air;
f. mengkoordinir petugas pembaca meter;
g. melakukan input data pelanggan;

h. melakukan estimasi yang meter airnya rusak dan tidak bisa terbaca;
i. melakukan pengendalian *ilegal tapping*;
j. melakukan penertiban *illegal tapping*;
k. membuat laporan bulanan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pelanggan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 Oktober 2026 M
15 Jumadil Awal 1448 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Oktober 2026 M
16 Jumadil Awal 1448 H

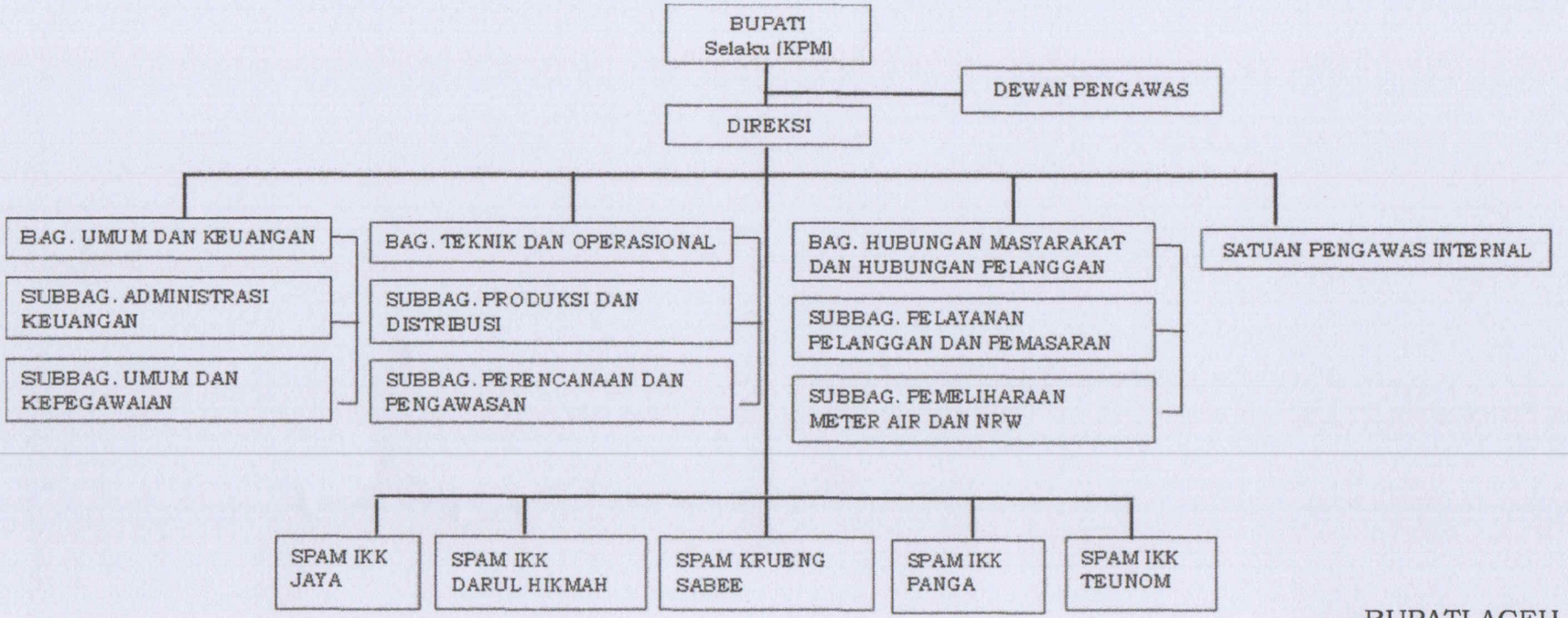
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MASRI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA

STRUKTUR ORGANISASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA



BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI